

## Kolaborasi Lintas Sektor, Pemkab Buton Selatan-SMI Hadirkan Program Sosial, Pengobatan Gratis dan Donor Darah Digelar



Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Busel) bersama Yayasan Sahabat Muadz Indonesia (SMI) menggelar bakti sosial terpadu

Laporan: Firman, Baubau Post-Durasi Times

BUTON SELATAN, BP-Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Busel) bersama Yayasan Sahabat Muadz Indonesia (SMI) menggelar bakti sosial terpadu yang menghadirkan layanan kesehatan gratis, pelatihan keagamaan, hingga donor darah. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari di Rumah Jabatan Bupati Busel, Kamis (16/4/2026), sebagai upaya memperluas akses pelayanan publik di tengah keterbatasan anggaran.

Bakti sosial tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari jajaran pemerintah daerah, organisasi masyarakat, hingga tenaga medis. Program ini mencakup pengobatan massal gratis bekerja sama dengan

Lanjut ke Hal: 7

## Kemenag Buton Selatan Apresiasi Program Pembinaan Imam dan Da'i Berbasis Sanad Yang Dilakukan Pemda Busel dan Yayasan Muadz Kendari



Laporan: Ardi

BUTON SELATAN, BP-Upaya memperkuat kualitas dakwah dan kepemimpinan keagamaan di tingkat akar rumput terus digalakkan di Buton Selatan melalui pelatihan imam masjid dan da'i yang diselenggarakan pemerintah daerah bersama Yayasan Muadz Kendari. Program ini mendapat apresiasi dari Kementerian Agama Buton Selatan karena dinilai strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan figur imam dan da'i yang kompeten.

Kepala Kementerian Agama Buton Selatan Khalifah SPd MPd melalui Kepala Subbagian Tata Usaha Kemenag Buton Selatan Muhammad Ilham Ibnu Wahid, S.Si menegaskan pentingnya kaderisasi dalam menjaga keberlanjutan peran imam di masa depan. Ia menilai regenerasi menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi.

"Kita memang masih menghadapi keterbatasan dalam regenerasi imam. Idealnya, generasi muda juga ikut ambil bagian dalam pelatihan ini," ujarnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan, sebagian besar peserta diketahui berasal dari kalangan usia lanjut. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan regenerasi yang perlu ditangani melalui program pembinaan yang lebih terarah.

Menurut Ilham, salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah dengan membuat segmentasi pelatihan, termasuk program khusus pengkaderan calon imam muda. Langkah ini

Lanjut ke Hal: 7

## Bantuan PKK Buton Tengah dan Kemensos Ringankan Beban Warga Korban Kebakaran Lakudo melalui Program ATENSI



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP- Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, menerima penyaluran bantuan logistik dan sosial dari Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) bersama Kementerian Sosial RI, Jumat (10/04/2026). Bantuan tersebut menyalurkan korban kebakaran serta warga penerima program sosial sebagai bagian dari upaya memperkuat jaring pengaman sosial di daerah.

Penyaluran bantuan

dipimpin langsung oleh Ketua TP-PKK Buton Tengah, Umi Noranah Azhari, S.Pd, yang hadir bersama jajaran pemerintah daerah dan perwakilan Sentra Meohai Kendari. Kegiatan ini menjadi bagian dari kesinambungan program sosial yang sebelumnya dilaksanakan di Kecamatan Gu.

Sebanyak empat keluarga korban kebakaran menjadi penerima bantuan logistik. Mereka berasal dari Desa Onewara sebanyak tiga keluarga dan satu keluarga dari Desa Wara. Bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan dasar

untuk membantu pemulihan pascabencana.

Selain itu, sebanyak 24 warga Lakudo juga menerima bantuan melalui Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan melalui dukungan sosial yang berkelanjutan.

Umi Noranah Azhari menegaskan bahwa kehadiran TP-PKK di tengah masyarakat bukan sekadar menjalankan program rutin, melainkan

Lanjut ke Hal: 7

## Sekda Baubau La Ode Darusalam Dorong Tata Kelola Data Modern lewat Akselerasi EPSS



Laporan: Prasetyo

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau mempercepat pemenuhan dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026 melalui Rapat Koordinasi dan Monitoring-Evaluasi (Monev) terpadu yang digelar di aula Dinas Kominfo Kota Baubau, Kamis (16/04/2026). Langkah ini dilakukan untuk memastikan tata kelola data daerah semakin berkualitas dan mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti.

Kegiatan tersebut melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)

serta didampingi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Baubau sebagai pembina statistik sektoral. Fokus utama kegiatan ini adalah mempercepat kesiapan dokumen sekaligus meningkatkan kualitas implementasi Satu Data Indonesia di tingkat daerah.

Kepala BPS Kota Baubau, Musdin, menegaskan bahwa EPSS menjadi instrumen strategis dalam menilai tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. "Melalui EPSS, kita dapat melihat sejauh mana tata kelola data di daerah berjalan efektif, terstandar, dan

mampu mendukung kebijakan," ujarnya.

Ia menambahkan, BPS siap memberikan pendampingan dalam setiap tahapan, mulai dari penyusunan dokumen hingga evaluasi, guna memastikan seluruh indikator terpenuhi secara optimal.

Secara historis, penguatan statistik sektoral di Indonesia mulai mendapat perhatian serius sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan ini mengadopsi praktik global yang telah

Lanjut ke Hal: 7

## Kolaborasi Lintas Sektor, Pemkab Buton Selatan-SMI Hadirkan Program Sosial, Pengobatan Gratis dan Donor Darah Digelar

dengan Rumah Sakit Bahteramas, pelatihan imam masjid, serta donor darah yang dijadwalkan pada Sabtu.

Sekretaris Daerah Buton Selatan, La Ode Harwanto, yang membuka kegiatan tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, sinergi menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan program sosial.

"Kolaborasi ini menunjukkan bahwa kebersamaan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam kondisi efisiensi anggaran saat ini," ujar La Ode Harwanto dalam sambutannya.

Ia juga menyampaikan bahwa Bupati Buton Selatan tidak dapat hadir pada pembukaan kegiatan karena menjalankan tugas dinas di luar daerah. Namun, kepala daerah dijadwalkan akan hadir pada penutupan kegiatan sebagai bentuk dukungan penuh pemerintah.

Kegiatan ini turut dihadiri Ketua TP PKK Busel Sitti Norma

Adios yang juga menjabat sebagai Ketua PMI Buton Selatan, Ketua Yayasan Sahabat Muadz Indonesia Zaenal Mursalin, unsur Forkopimda, kepala OPD, serta para imam masjid se-Kabupaten Busel.

Ketua Yayasan Sahabat Muadz Indonesia, Zaenal Mursalin, menekankan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam mendukung pembangunan sosial berbasis kolaborasi.

"Kami berharap kegiatan ini tidak hanya memberi manfaat langsung, tetapi juga memperkuat jaringan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah daerah," kata Zaenal.

Selain layanan kesehatan, pelatihan imam masjid menjadi salah satu fokus kegiatan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya keagamaan di tingkat lokal agar mampu menjawab tantangan sosial di masyarakat.

Sementara itu, kegiatan donor darah yang diinisiasi oleh

Sitti Norma Adios diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan stok darah di daerah. "Donor darah ini adalah bentuk kepedulian nyata yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat," ujarnya.

Secara historis, kegiatan bakti sosial terpadu seperti ini telah menjadi bagian penting dalam strategi pelayanan publik di Indonesia. Sejak era 2000-an, kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil semakin diperkuat, terutama pascareformasi yang mendorong partisipasi publik dalam pembangunan.

Di tingkat nasional, program pelayanan kesehatan gratis dan donor darah juga menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan yang melibatkan lembaga seperti Palang Merah Indonesia (PMI), yang berdiri sejak 1945 dan terus berperan dalam penanganan krisis kesehatan dan bencana.

Sementara secara global, konsep kolaborasi lintas sektor dalam pelayanan sosial

dikenal luas melalui pendekatan community-based development yang banyak diterapkan sejak dekade 1990-an oleh berbagai lembaga internasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan bakti sosial terpadu di Buton Selatan ini menjadi contoh konkret bagaimana pendekatan tersebut diimplementasikan di tingkat daerah, dengan menggabungkan aspek kesehatan, sosial, dan keagamaan dalam satu program terpadu.

Pemerintah Kabupaten Buton Selatan juga menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Sahabat Muadz Indonesia atas kontribusi dan kepercayaan yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga sosial, dan masyarakat dapat terus diperkuat guna mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Buton Selatan. (\*)

## Sekda Baubau La Ode Darusalam Dorong Tata Kelola Data Modern lewat Akselerasi EPSS

telah lebih dahulu diterapkan di berbagai negara maju, seperti konsep open data government di Inggris dan Amerika Serikat yang menekankan transparansi serta interoperabilitas data.

Di tingkat internasional, Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mendorong pemanfaatan data berkualitas sebagai fondasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dalam konteks tersebut, EPSS menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk menyelaraskan tata kelola data nasional dengan standar global.

Sekretaris Daerah Kota Baubau, La Ode Darus Salam, dalam sambutannya menekankan bahwa data kini bukan lagi sekadar pelengkap administratif, melainkan aset strategis pembangunan daerah.

"Pemerintah tidak bisa lagi bekerja berdasarkan asumsi. Semua kebijakan harus berbasis data yang akurat, mutakhir, dan

dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kualitas data yang dihasilkan OPD, termasuk kelengkapan metadata dan penggunaan kode referensi yang seragam agar dapat diintegrasikan secara efektif antar-instansi.

Menurutnya, keberhasilan EPSS tidak hanya diukur dari kelengkapan dokumen, tetapi juga dari sejauh mana data tersebut benar-benar dimanfaatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

"Melalui monev terpadu ini, kita ingin memastikan bahwa prosesnya tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan," ujarnya.

Peran Dinas Kominfo Kota Baubau sebagai wali data turut menjadi perhatian dalam forum tersebut. Kominfo dituntut menjadi koordinator utama dalam integrasi data, validator kualitas, sekaligus fasilitator peningkatan kapasitas OPD.

Dengan posisi-

si strategis tersebut, Kominfo diharapkan mampu memastikan seluruh data daerah tersusun secara sistematis, terstandar, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

Sekda juga mengajak seluruh OPD untuk memperkuat komitmen dan meningkatkan kolaborasi lintas sektor. Ia menilai, keberhasilan EPSS merupakan hasil kerja bersama yang memerlukan keterbukaan dalam menyampaikan kendala di lapangan.

"Jika ada hambatan, sampaikan secara terbuka agar kita bisa merumuskan solusi dan rencana aksi yang konkret," katanya.

Melalui akselerasi ini, Pemerintah Kota Baubau menargetkan peningkatan nilai EPSS sekaligus memperkuat fondasi pembangunan berbasis data yang berkelanjutan, sejalan dengan arah kebijakan nasional dan tren global dalam tata kelola pemerintahan modern. (\*)

## Bantuan PKK Buton Tengah dan Kemensos Ringankan Beban Warga Korban Kebakaran Lakudo melalui Program ATENSI

sosial yang nyata.

"Kehadiran kami di sini sebagai TP-PKK Buton Tengah adalah bentuk perhatian tulus kami kepada masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa warga tidak merasa sendiri dalam menghadapi musibah," ujarnya.

Ia juga menyampaikan dukanya mendalam kepada para korban kebakaran dan berharap mereka diberikan ketabahan dalam menghadapi ujian tersebut.

"Kami turut berduka atas musibah ini. Semoga Bapak dan Ibu yang terdampak senantiasa diberikan kesabaran dan kekuatan," kata Umi Noranah.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi respons cepat Kementerian Sosial RI melalui Sentra Meohai Kendari yang dinilai sigap dalam menyalurkan bantuan hingga ke tingkat masyarakat.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Sosial, khususnya Sentra Meohai Kendari, yang telah memastikan bantuan ini tepat sasaran," tambahnya.

Kepala Dinas Sosial Buton Tengah, Dra.

Nurlia Husuni, M.Si, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana sosial.

Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi faktor utama dalam mempercepat distribusi bantuan dan memastikan keberlanjutan program kesejahteraan sosial.

Secara historis, program bantuan sosial di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak era reformasi, terutama setelah penguatan peran Kementerian Sosial dalam penanganan bencana dan perlindungan kelompok rentan. Program seperti ATENSI menjadi salah satu inovasi yang mengintegrasikan layanan sosial berbasis kebutuhan individu.

Di tingkat global, pendekatan bantuan sosial terpadu juga telah diterapkan di berbagai negara sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial. Lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa mendorong penguatan social safety net untuk

mengurangi dampak kemiskinan dan bencana.

Di Indonesia sendiri, berbagai bencana kebakaran permukiman masih menjadi tantangan, terutama di wilayah dengan kepadatan hunian tinggi dan keterbatasan infrastruktur. Oleh karena itu, kehadiran bantuan cepat menjadi krusial dalam meminimalkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat terdampak.

Kegiatan di Lakudo ini dihadiri oleh unsur pemerintah kecamatan dan desa setempat, serta perwakilan Sentra Meohai Kendari yang turut memastikan proses distribusi berjalan lancar.

Melalui penyaluran bantuan ini, diharapkan masyarakat terdampak dapat segera bangkit dan melanjutkan aktivitas kehidupan sehari-hari, sekaligus memperkuat solidaritas sosial di tengah komunitas.

Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di Kabupaten Buton Tengah. (\*)

## Kemenag Buton Selatan Apresiasi Program Pembinaan Imam dan Da'i Berbasis Sanad Yang Dilakukan Pemda Busel dan Yayasan Muadz Kendari

dinilai penting agar tidak terjadi kekosongan imam di tengah masyarakat di masa mendatang.

"Pembinaan tidak cukup dilakukan satu kali, tetapi harus berkesinambungan agar manfaatnya benar-benar dirasakan," katanya menegaskan.

Selain aspek regenerasi, pelatihan da'i juga menjadi fokus utama dalam kegiatan tersebut. Kemenag menilai kualitas dakwah sangat dipengaruhi oleh kemampuan metode penyampaian pesan keagamaan kepada masyarakat.

"Dakwah tidak hanya soal materi, tetapi juga bagaimana cara menyampaikan pesan agar mudah dipahami dan diterima," ujar Ilham.

Sementara itu, pelatihan imam masjid tidak hanya menitikberatkan pada kemampuan membaca

Al-Qur'an, tetapi juga aspek kepemimpinan dan pembinaan umat. Imam diharapkan mampu menjadi rujukan keagamaan sekaligus penggerak sosial di lingkungan masing-masing.

Salah satu keunggulan pelatihan ini adalah penerapan metode pembelajaran bacaan Al-Fatihah dengan sanad yang bersambung. Pendekatan ini dianggap penting karena Al-Fatihah merupakan rukun dalam salat yang menentukan keabsahan ibadah.

"Pelatihan ini spesial karena bacaan Al-Fatihah diajarkan dengan sanad yang jelas dan bersambung," katanya.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan mendapat respons positif dari peserta. Testimoni yang diterima menunjukkan adanya peningkatan kapasitas, baik dalam pemahaman keag-

amaan maupun teknik berdakwah.

Kemenag Buton Selatan juga mendorong keterlibatan lebih luas dari berbagai lembaga keagamaan untuk memperluas jangkauan program pembinaan di seluruh wilayah kabupaten.

Dalam konteks historis, pembinaan imam dan dai di Indonesia telah menjadi bagian penting dari pembangunan keagamaan sejak era awal kemerdekaan. Kementerian Agama yang dibentuk pada 1946 memiliki mandat untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama, termasuk melalui pendidikan dan pelatihan tokoh agama.

Di tingkat global, tradisi pengkaderan ulama dan imam telah berlangsung sejak berabad-abad lalu, terutama di pusat-pusat peradaban Islam seperti Kairo dan Mekkah, di mana sistem

sanad menjadi fondasi dalam menjaga otoritas keilmuan dan keabsahan ajaran.

Mengacu pada praktik tersebut, pelatihan imam berbasis sanad yang diterapkan di Buton Selatan dinilai sejalan dengan tradisi keilmuan Islam yang telah mengakar kuat secara internasional.

Kemenag berharap para peserta pelatihan dapat menjadi agen perubahan dengan menularkan ilmu yang diperoleh kepada masyarakat luas.

"Harapannya, peserta yang sudah dilatih bisa menjadi pelatih bagi yang lain di wilayahnya masing-masing," tutup Ilham.

Program ini diharapkan menjadi langkah awal menuju penguatan ekosistem keagamaan yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan zaman. (\*)

## Baleg DPR Sepakati 5 RUU Baru dan Evaluasi Prolegnas 2026



Baleg DPR Sepakati 5 RUU Baru dan Evaluasi Prolegnas 2026

### Laporan: Alwan

JAKARTA, BP-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah menyepakati penambahan lima rancangan undang-undang (RUU) baru dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR yang berlangsung pada Rabu (15/4), sebagai bagian dari evaluasi berkala agenda legislasi nasional.

Selain penambahan RUU, rapat juga menyoroti keberlanjutan status kekhususan Provinsi Aceh yang akan berakhir pada 2027. Hal ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan masa berlaku dana otonomi khusus yang telah berjalan sejak 2007.

Wakil Ketua Baleg DPR, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa pembahasan mengenai perpanjangan kekhususan Aceh telah mencapai kesepakatan awal. "Kita sudah sepakat akan memperpanjang kekhususan pemerintahan Aceh ini, termasuk dana otonomi khusus," ujarnya dalam rapat.

Ia menambahkan bahwa pembahasan lanjutan akan difokuskan pada besaran dana oto-

nomi khusus yang akan diberikan ke depan. Menurutnya, aspek tersebut penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan di Aceh.

Sejalan dengan itu, Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, menilai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan saat ini. "Ini harus benar-benar kita rampungkan pada kesempatan ini," kata Bob dalam rapat sebelumnya.

Dalam konteks evaluasi Prolegnas, Bob Hasan menjelaskan bahwa pembaruan daftar prioritas merupakan hal yang wajar dilakukan secara berkala. "Tidak apa-apa tiga bulan sekali juga evaluasi, tidak ada masalah," ujarnya.

Dari hasil evaluasi tersebut, disepakati lima RUU baru yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. Empat RUU berasal dari usulan DPR, yaitu RUU Perumahan dan Kawasan Permukiman, RUU Penyiaran, RUU Profesi Kurator, serta RUU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sementara satu RUU lainnya, yakni RUU tentang Pelelangan, berasal dari pemerintah.

Selain penambahan RUU, Baleg DPR juga menyetu-

ujui perubahan nomenklatur RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi RUU Masyarakat Adat. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan pendekatan hukum dengan dinamika sosial yang berkembang.

Tidak hanya itu, terjadi pula perubahan status penguasaan terhadap RUU Narkotika dan Psikotropika yang kini menjadi inisiatif DPR, dari sebelumnya merupakan usulan pemerintah.

Bob Hasan menegaskan bahwa seluruh hasil kesepakatan tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan. "Nanti tentunya akan kita bacakan dalam rapat paripurna mendatang," ujarnya.

Secara historis, Prolegnas merupakan instrumen perencanaan legislasi yang mulai diperkuat sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa undang-undang berjalan lebih terarah, sistematis, dan sesuai kebutuhan nasional.

Dalam praktik internasional, perencanaan legislasi serupa juga diterapkan di berbagai negara. Misalnya,

Amerika Serikat melalui agenda legislasi tahunan Kongres, serta Inggris dengan program legislasi pemerintah yang diumumkan dalam "Queen Speech". Model ini menunjukkan pentingnya perencanaan hukum yang terstruktur dalam sistem demokrasi modern.

Sementara itu, terkait Aceh, kekhususan daerah tersebut berakar dari kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka dalam Perjanjian Helsinki tahun 2005. Kesepakatan itu menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh pada 2006, yang mengatur otonomi khusus dan distribusi dana pembangunan.

Dengan adanya evaluasi dan penambahan RUU baru ini, DPR berharap proses legislasi ke depan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu menjawab tantangan pembangunan nasional secara komprehensif.

Kesepakatan tersebut sekaligus mencerminkan upaya DPR dan pemerintah dalam menjaga kesinambungan kebijakan hukum, baik dalam skala nasional maupun dalam konteks kekhususan daerah seperti Aceh. (\*)

## Gubernur Aceh Mualem Tekankan Kenaikan Dana Otsus 2,5 Persen untuk Pemulihan Daerah, DPR Janjikan Penyelesaian Tahun Ini



Gubernur Aceh Mualem Tekankan Kenaikan Dana Otsus 2,5 Persen untuk Pemulihan Daerah, DPR Janjikan Penyelesaian Tahun Ini

### Laporan: Radit

JAKARTA-Pemerintah Aceh kembali menyoroti urgensi percepatan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU PA) yang dinilai penting untuk memperkuat pembangunan daerah sekaligus memastikan keberlanjutan dana otonomi khusus (otsus). Dalam pembahasan terbaru bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengusulkan kenaikan dana otsus menjadi 2,5 persen.

Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Anjong Mon Mata, Kompleks Pendopo Gubernur Aceh, pada Kamis (16/4), ketika rombongan Baleg DPR melakukan kunjungan kerja ke Aceh untuk membahas revisi regulasi tersebut.

Mualem menekankan bahwa percepatan revisi UU PA harus segera dilakukan agar tidak menghambat program pembangunan, terutama pemulihan wilayah pascabencana yang masih menjadi tantangan di Aceh.

"Kalau bisa sebelum Agustus, paling lambat Juli sudah selesai," ujar Mualem dalam pertemuan tersebut, menegaskan target waktu penyelesaian revisi undang-undang.

Ia juga menyampaikan bahwa peningkatan dana otsus menjadi 2,5 persen diperlukan untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Harapannya, revisi ini bisa mengakomodasi kebutuhan Aceh, termasuk

penambahan dana otsus 2,5 persen untuk pemulihan," kata Mualem.

Usulan tersebut tidak terlepas dari konteks historis Aceh sebagai daerah dengan status kekhususan. Otonomi khusus Aceh sendiri lahir dari kesepakatan damai Helsinki tahun 2005 antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menjadi tonggak penting stabilitas politik di wilayah tersebut setelah konflik panjang.

Selain itu, status otonomi khusus Aceh juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kewenangan lebih luas dalam pengelolaan sumber daya dan fiskal daerah, termasuk dana otsus yang selama ini menjadi instrumen pembangunan utama.

Dalam sejarah kebijakan desentralisasi Indonesia, skema otonomi khusus juga diterapkan di Papua sebagai bagian dari upaya menjaga integrasi nasional sekaligus menjawab ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Sementara itu, di tingkat global, konsep otonomi khusus juga dikenal di beberapa wilayah seperti Skotlandia di Inggris dan Quebec di Kanada, yang diberi kewenangan fiskal dan administratif lebih besar untuk mengelola kepentingan daerahnya masing-masing.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan menya-

takan bahwa pihaknya telah menyiapkan draf revisi yang mencakup usulan perpanjangan sekaligus peningkatan dana otsus Aceh.

"Kami sudah menyusun draf 2,5 persen, tetapi itu tetap perlu dibicarakan lebih lanjut oleh Gubernur dengan Presiden," ujar Bob Hasan.

Ia menegaskan bahwa pembahasan revisi UU Pemerintahan Aceh ditargetkan selesai dalam tahun berjalan sesuai kesepakatan antara legislatif dan eksekutif.

Menurut Bob, salah satu poin penting dalam revisi tersebut adalah penguatan kepastian hukum terkait keberlanjutan dana otsus agar tidak lagi bersifat terbatas waktu.

Baleg DPR juga mengusulkan agar skema dana otsus tidak dibatasi jangka waktu tertentu selama Aceh masih berstatus daerah otonomi khusus, sehingga memberikan kepastian fiskal jangka panjang bagi pembangunan daerah.

Revisi UU Pemerintahan Aceh ini dinilai menjadi momentum penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan pascakonflik sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika nasional.

Dengan demikian, pembahasan antara DPR dan Pemerintah Aceh tidak hanya menyangkut aspek fiskal, tetapi juga menyentuh dimensi politik, sejarah, dan keberlanjutan perdamaian di Tanah Rencong. (\*)

## PAD Sultra Lampau Target Kuartal I 2026, Kinerja Awal Tahun Moncer



### TARGET PAD

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2026 **Rp. 1.389.956.045.987.**

### REALISASI

Total Realisasi Kuartal Pertama Tahun 2026 Januari-Maret **Rp. 362.105.659.669**

### PERSENTASE

Total Persentase Capaian Kuartal Pertama Tahun 2026 Januari - Maret **26.05%**

#### Laporan: Mashuri

SULTRA, BP-Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada kuartal pertama tahun 2026 menunjukkan hasil menggembirakan dengan capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini menjadi indikator awal yang kuat terhadap pengelolaan fiskal daerah di awal tahun anggaran.

Capaian tersebut tidak hanya mencerminkan peningkatan angka pendapatan, tetapi juga menegaskan efektivitas strategi yang diterapkan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan. Berbagai sektor dinilai berkontribusi signifikan dalam mendorong realisasi PAD di triwulan pertama.

Secara historis, capaian PAD yang melampaui target pada awal tahun bukan hal yang mudah dicapai. Secara nasional, banyak daerah baru mampu mencapai target pada pertengahan hingga akhir tahun anggaran. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, tren global menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi pascapan-

demasi masih memengaruhi kemampuan fiskal daerah di berbagai negara.

Keberhasilan Sultra ini, menurut sejumlah pengamat ekonomi daerah, menunjukkan adanya perbaikan tata kelola keuangan serta peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi. Selain itu, digitalisasi layanan pendapatan juga dinilai berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi.

"Ini bukan sekadar angka, tetapi bukti nyata bahwa kerja sama yang solid dan strategi yang tepat mampu menghasilkan capaian yang optimal," ujar salah satu pejabat daerah dalam keterangannya, menggambarkan keberhasilan tersebut.

Dari sisi waktu, pencapaian ini terjadi pada periode Januari hingga Maret 2026, yang merupakan fase awal pelaksanaan program kerja tahunan. Pada periode ini, biasanya realisasi PAD masih berada pada tahap awal, sehingga capaian di atas target menjadi catatan positif tersendiri.

Adapun faktor

utama yang mendorong peningkatan PAD antara lain optimalisasi pajak daerah, peningkatan retribusi layanan publik, serta penguatan pengawasan terhadap potensi kebocoran pendapatan. Pendekatan berbasis data dan evaluasi berkala juga menjadi bagian dari strategi yang diterapkan.

"Kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah menjadi kunci utama dalam menjaga ritme kerja dan memastikan setiap target dapat dicapai secara maksimal," ungkap sumber tersebut dalam kutipan lainnya.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, tren pertumbuhan PAD Sultra pada awal tahun ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat fondasi ekonomi lokal, termasuk sektor perdagangan, jasa, dan sumber daya alam.

Secara internasional, lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia mencatat bahwa daerah yang mampu menjaga konsisten-

si kebijakan fiskal sejak awal tahun cenderung memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik sepanjang tahun berjalan. Kondisi ini tampaknya mulai tercermin pada kinerja Sultra saat ini.

"Ke depan, tantangan terbesar adalah menjaga konsistensi dan meningkatkan capaian agar lebih optimal pada kuartal berikutnya," ujar pejabat tersebut, menegaskan pentingnya keberlanjutan kinerja.

Pemerintah daerah pun diharapkan dapat mempertahankan momentum positif ini melalui inovasi kebijakan, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan sinergi lintas sektor. Dengan demikian, target tahunan PAD dapat tercapai bahkan berpotensi melampaui ekspektasi.

Keberhasilan pada kuartal pertama ini menjadi pijakan awal yang penting bagi Sulawesi Tenggara untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (\*)

## Kemkomdigi Dalam Perbedaan Rating Usia dan Konten Gim



Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memastikan penguatan perlindungan konsumen digital

#### Laporan: Mashuri

JAKARTA, BP-Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memastikan penguatan perlindungan konsumen digital dengan mendalami ketidaksesuaian antara klasifikasi usia dan konten sejumlah gim pada platform Steam. Langkah ini diambil sebagai respons atas temuan yang berpotensi membingungkan masyarakat, khususnya orang tua dalam menilai kelayakan gim bagi anak.

Upaya tersebut merupakan bagian dari implementasi regulasi terbaru, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak. Aturan ini mempertegas kewajiban penyedia platform digital dalam menghadirkan sistem klasifikasi yang akurat dan transparan.

Sebagai tindak lanjut, Kemkomdigi melakukan investigasi menyeluruh yang mencakup mekanisme klasifikasi pada platform serta proses produksi konten oleh pengembang gim. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan keselarasan antara rating usia dan isi permainan yang dikonsumsi pengguna.

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, Sonny Hendra Sudaryana, menegaskan pentingnya sistem klasifikasi sebagai instrumen perlindungan masyarakat. "Klasifikasi usia bukan sekadar label, tetapi panduan utama bagi orang tua dalam memastikan anak mengakses konten yang sesuai," ujarnya di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Menurut Sonny, penerapan Indonesia Game Rating System (IGRS) menjadi tonggak penting dalam tata kelola industri gim nasional. Ia menyebut, regulasi tersebut telah melalui proses panjang sejak 2014 sebelum akhirnya diimplementasikan secara penuh pada 2024.

"Setelah penantian hampir satu dekade, Indonesia kini memiliki sistem klasifikasi gim yang setara dengan standar internasional," kata Sonny. Ia menambahkan bahwa keberadaan regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi industri sekaligus perlindungan bagi konsumen.

Dalam proses investigasi, Kemkomdigi juga menjalin komunikasi intensif dengan pihak Steam untuk mempercepat klarifikasi. Kedua pihak menelusuri konten yang dinilai tidak selaras antara rating dan substansi gim.

Sebagai langkah awal mitigasi, Steam telah menurunkan daftar rating gim yang dianggap bermasalah. Tindakan ini dilakukan guna menghindari kebingungan publik dan menjaga kepercayaan pengguna terhadap sistem klasifikasi digital.

"Langkah cepat ini penting agar masyarakat tidak dirugikan oleh informasi yang tidak akurat," ujar Sonny. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengawasi proses penyesuaian yang dilakukan oleh platform.

Secara historis, sistem klasifikasi gim telah lama diterapkan di berbagai negara. Di Amerika Serikat, misalnya, Entertainment Software Rating Board (ESRB) mulai digunakan sejak 1994 sebagai respons terhadap kekhawatiran publik terhadap konten

kekerasan dalam gim. Sementara di Eropa, sistem PEGI (Pan European Game Information) diperkenalkan pada 2003 untuk memberikan panduan serupa bagi konsumen.

Indonesia sendiri baru mengadopsi sistem klasifikasi gim secara komprehensif melalui IGRS yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2024. Kehadiran regulasi ini menandai keseriusan pemerintah dalam menghadirkan ekosistem digital yang aman.

Di tingkat nasional, pertumbuhan industri gim yang pesat juga menjadi faktor pendorong penguatan regulasi. Data menunjukkan bahwa jumlah pengguna gim di Indonesia terus meningkat dalam satu dekade terakhir, seiring dengan penetrasi internet dan perangkat digital.

Kemkomdigi menilai bahwa ketidaksesuaian rating dapat berdampak pada perkembangan psikologis anak jika tidak ditangani secara serius. Oleh karena itu, pengawasan terhadap platform digital akan terus ditingkatkan.

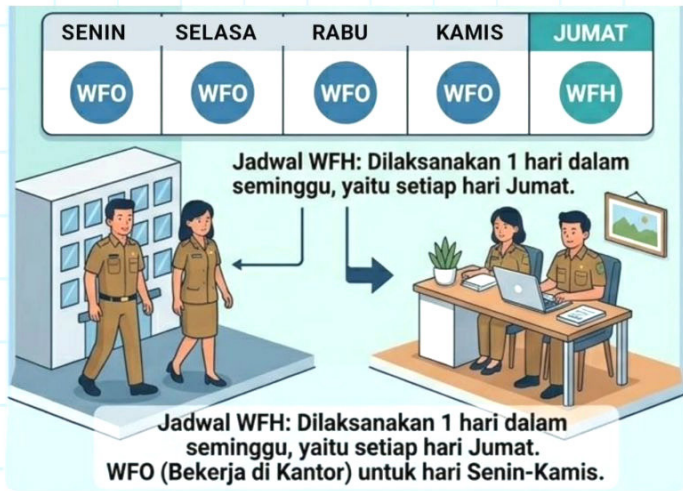
"Semua langkah ini kami lakukan demi memastikan keluarga Indonesia memiliki panduan yang jelas dalam memilih konten digital," tutur Sonny.

Ke depan, pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan pelaku industri, termasuk pengembang gim dan penyedia platform, guna memastikan penerapan sistem klasifikasi berjalan konsisten dan akuntabel.

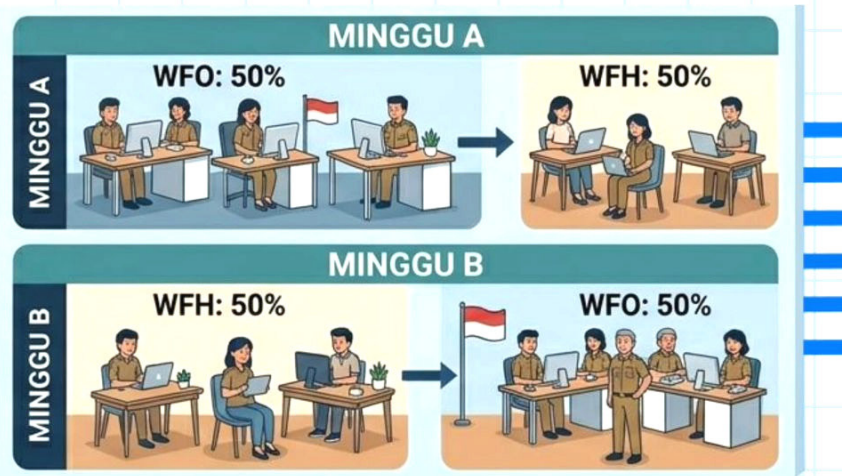
Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan perlindungan konsumen, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri gim nasional yang sehat dan berkelanjutan di tengah persaingan global. (\*)

## WFH Setiap Jumat, Pemkab Buton Tengah Dorong ASN Lebih Produktif, Layanan Publik Dijaga Optimal

Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menetapkan penyesuaian lokasi kerja yang mengombinasikan bekerja di kantor (Work From Office) dan bekerja dari rumah (Work From Home).



Pelaksanaan WFH dilakukan secara proporsional dan bergantian (misal: 50% staf WFO dan 50% WFH secara bergantian setiap minggunya) untuk memastikan kantor tidak kosong.



Laporan:Ardi

BUTON TENGAH-Pemerintah Kabupaten Buton Tengah mulai menerapkan sistem kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan memberlakukan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi budaya kerja birokrasi yang bertujuan meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik.

Langkah tersebut diambil sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN yang berlaku secara nasional. Implementasi kebijakan ini mulai dijalankan pada April 2026 di seluruh perangkat daerah di Buton Tengah.

Kepala daerah menegaskan bahwa kebijakan ini tidak mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. "WFH bukan berarti menurunkan kinerja. Justru ini mendorong ASN bekerja lebih adaptif dan berbasis hasil," ujar seorang pejabat pemerintah daerah dalam keteran-

gannya.

Meski demikian, tidak seluruh unit kerja dapat menerapkan sistem kerja jarak jauh. Pemerintah menetapkan sejumlah sektor layanan publik tetap bekerja dari kantor atau Work From Office (WFO) secara penuh setiap hari kerja.

Unit yang wajib WFO meliputi pejabat eselon III ke atas, camat, lurah, dan kepala desa. Selain itu, layanan strategis seperti administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) dan PTSP, serta sektor kesehatan, pendidikan, dan pendapatan daerah tetap beroperasi secara langsung.

Pelayanan kebersihan dan persampahan, serta unit penanggulangan bencana dan ketertiban umum juga tidak termasuk dalam skema WFH. Kebijakan ini diambil untuk memastikan layanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan tanpa gangguan.

Sementara itu, perangkat daerah yang bersifat administratif dan pendukung diberi ruang untuk menerapkan WFH secara selektif. Pengaturan ini harus tetap mempertimbangkan target kinerja dan efektivitas kerja masing-masing organisasi perangkat

daerah (OPD).

Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan penyesuaian sistem absensi melalui aplikasi e-office. Hal ini memungkinkan pengawasan kehadiran ASN tetap berjalan meskipun sebagian bekerja dari luar kantor.

Kepala OPD diwajibkan menyusun pembagian jadwal kerja ASN dan melaporkannya kepada bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). "Kami minta seluruh OPD disiplin dalam pelaporan agar kebijakan ini berjalan terukur," kata pejabat terkait.

Laporan tersebut harus disampaikan paling lambat Rabu, 8 April 2026. Pemerintah daerah juga akan melakukan pengawasan secara berkelanjutan untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai tujuan.

Secara historis, pola kerja fleksibel seperti WFH mulai diterapkan secara luas di berbagai negara sejak pandemi COVID-19 pada 2020. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang menjadikan sistem kerja hybrid sebagai standar baru untuk mening-

katkan efisiensi kerja dan keseimbangan kehidupan pegawai.

Di Indonesia, kebijakan serupa telah diujicobakan di sejumlah kementerian dan pemerintah daerah sejak masa pandemi. Pemerintah pusat kemudian mendorong transformasi budaya kerja ASN melalui regulasi formal guna menjawab tantangan digitalisasi birokrasi.

Sejalan dengan tren global tersebut, Buton Tengah menjadi salah satu daerah yang mulai mengadopsi sistem kerja hybrid secara terstruktur. "Kami ingin mengikuti perkembangan global tanpa mengabaikan kebutuhan lokal," ujar pejabat daerah.

Dengan kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah berharap dapat membentuk budaya kerja ASN yang lebih fleksibel, produktif, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, reformasi ini diharapkan mampu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Ke depan, evaluasi berkala akan dilakukan untuk mengukur efektivitas kebijakan WFH ini. Pemerintah tidak menutup kemungkinan melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan dinamika pelayanan publik di daerah. (\*)

## Tingkatkan Literasi, OJK Sultra Gandeng Pemda Edukasi Warga Buteng



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Tengah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara menggelar edukasi keuangan yang menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap investasi ilegal dan pinjaman daring tidak resmi. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Pancana, Kantor Bupati Buton Tengah, Selasa (7/4/2026), dengan melibatkan pelajar, perbankan, dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Edukasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, seiring meningkatnya kasus penipuan berkedok investasi di berbagai daerah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Asisten I Sekretariat Daerah Buton Tengah, Ahmad Sabir, yang membuka kegiatan tersebut, menegaskan bahwa literasi keuangan merupakan fondasi penting dalam mencegah masyarakat terjebak dalam praktik keuangan ilegal.

"Tidak semua masyarakat yang telah mengakses layanan keuangan memahami manfaat dan risiko produk yang digunakan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap praktik keuangan tidak sehat dan penipuan," ujar Ahmad Sabir dalam sambutannya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025, indeks literasi keuangan nasional berada di angka 66,46 persen, sementara indeks inklusi keuangan men-

capai 80,52 persen.

Perbedaan angka tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara akses terhadap layanan keuangan dengan pemahaman masyarakat dalam mengelola keuangan secara bijak.

Ahmad Sabir menambahkan, capaian inklusi keuangan nasional yang saat ini berada di kisaran 80,51 persen masih harus ditingkatkan guna mencapai target 90 persen melalui kolaborasi lintas sektor.

"TPAKD diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam mendorong pemerataan akses keuangan, sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah," katanya.

Kegiatan edukasi ini juga merupakan implementasi dari kebijakan nasional, antara lain Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2021.

Secara historis, program literasi keuangan di Indonesia mulai diperkuat sejak pembentukan OJK pada tahun 2011, yang kemudian secara konsisten mendorong peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk jasa keuangan melalui berbagai program edukasi nasional.

Di tingkat global, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) sejak awal 2000-an telah mengkampanyekan pentingnya literasi keuangan sebagai bagian dari stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen.

Perwakilan Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Indra Nat-sir Dahlan, dalam

kesempatan tersebut menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam memilih produk keuangan yang aman dan legal.

"Masyarakat harus memastikan bahwa setiap layanan keuangan berasal dari lembaga yang terdaftar dan diawasi oleh OJK maupun Bank Indonesia," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa maraknya investasi ilegal dan pinjaman online tidak resmi seringkali memanfaatkan rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat.

Menurutnya, edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat dalam mengelola keuangan secara sehat.

Kegiatan ini turut melibatkan pelajar sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menanamkan pemahaman keuangan sejak usia dini.

"Edukasi ini diharapkan dapat membentuk masyarakat yang cerdas dalam mengelola keuangan, sekaligus melindungi dari risiko investasi ilegal," tutur Ahmad Sabir.

Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), pemerintah daerah berkomitmen memperluas akses layanan keuangan formal yang inklusif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah, OJK, dan sektor perbankan, kegiatan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Buton Tengah. (\*)

## Wamenkes Dorong Lab Kesehatan Berbasis AI dan Data Real-Time Nasional



**Peliput: Andina L**

JAKARTA-Transformasi sistem kesehatan nasional memasuki babak baru seiring dorongan pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam layanan laboratorium. Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, menegaskan bahwa laboratorium kesehatan harus bertransformasi menjadi garda terdepan dalam pendekatan prediktif dan preventif.

Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Seminar Nasional yang digelar Ikatan Laboratorium Kesehatan Indonesia (ILKI) 2026 di Jakarta, Kamis (16/4), yang diikuti pemangku kepentingan sektor kesehatan dari berbagai daerah.

Menurut Dante, pemerintah tengah mendorong integrasi data kesehatan nasional melalui platform SATUSEHAT dan sistem Electronic Health Record (EHR), sehingga hasil pemeriksaan laboratorium dapat diakses secara real-time dan mendukung penguatan surveilans kesehatan.

"Kita ingin hasil laboratorium tidak lagi tercecer, melainkan menjadi data real-time yang dapat diakses di mana saja dan memperkuat surveilans nasional," ujarnya.

Ia menjelaskan, langkah tersebut menjadi bagian dari strategi besar reformasi kesehatan yang telah digulirkan sejak pandemi COVID-19, yang memperlihatkan pentingnya integrasi data dan kecepatan deteksi dalam penanganan krisis kesehatan.

Dalam konteks global, transformasi laboratorium berbasis teknologi juga telah berkembang pesat. Organisasi seperti World Health Organization (WHO) mendorong negara-negara untuk memperkuat sistem laboratorium sebagai tulang punggung deteksi dini penyakit menular dan tidak menular.

Dante menilai, perkembangan Artificial Intelligence (AI) menjadi momentum penting dalam mempercepat perubahan tersebut. Ia menegaskan bahwa AI tidak menggantikan tenaga kesehatan, melainkan memperkuat kapasitas analisis dan pengambilan keputusan.

"AI bukanlah ancaman, melainkan akselerator yang menggeser layanan dari kuratif menjadi prediktif dan preventif," katanya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pemanfaatan teknologi tetap harus diimbangi dengan etika profesi dan tanggung jawab moral tenaga

kesehatan. "Nurani dan tanggung jawab profesional tidak akan tergantikan oleh teknologi apa pun," tambah.

Di sisi lain, pemerintah juga tengah memperkuat jejaring Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) melalui program InPULS yang mencakup pengembangan layanan dari Tier 1 hingga Tier 5. Upaya ini dilakukan untuk menjamin pemerataan kualitas layanan hingga ke daerah terpencil.

Secara historis, penguatan laboratorium kesehatan di Indonesia telah berlangsung sejak era pengendalian penyakit menular seperti tuberkulosis dan malaria, yang membutuhkan dukungan diagnosis laboratorium yang akurat. Peran tersebut semakin krusial dalam menghadapi tantangan penyakit baru di era globalisasi.

Meski demikian, Dante mengakui bahwa sektor laboratorium masih menghadapi tantangan, terutama terkait kenaikan biaya reagen serta ketergantungan terhadap alat kesehatan impor. Kondisi ini menuntut inovasi dan kemandirian nasional.

"Pemimpin laboratorium harus AI-aware dan mampu menyusun peta jalan digitalisasi

tanpa mengorbankan mutu layanan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pusat ILKI, Purwanto, menyampaikan bahwa organisasinya terus berperan aktif dalam mendukung pemerintah, termasuk dalam penyusunan regulasi terkait laboratorium kesehatan masyarakat.

Ia menuturkan bahwa ILKI menjadi wadah bagi berbagai fasilitas laboratorium, baik klinik maupun laboratorium kesehatan masyarakat, yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Kami turut membantu pemerintah dalam penyusunan regulasi, termasuk dalam perumusan kebijakan terkait Labkesmas," kata Purwanto.

Penyelenggaraan Seminar Nasional ILKI 2026 ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, organisasi profesi, akademisi, dan industri dalam menghadapi era transformasi digital kesehatan.

Kolaborasi lintas sektor tersebut dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas layanan laboratorium sekaligus memperkuat sistem kesehatan nasional yang adaptif, tangguh, dan berbasis data. (\*)

## Imunisasi MR bagi Tenaga Kesehatan Resmi Digelar di Seluruh Indonesia untuk Tekan Kasus Campak Nasional

JAKARTA-Kementerian Kesehatan resmi memulai program imunisasi Measles-Rubella (MR) bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, dan dokter internship secara nasional mulai 10 April 2026. Kebijakan ini ditempuh sebagai langkah strategis untuk melindungi kelompok berisiko tinggi sekaligus memutus rantai penularan campak di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pelaksanaan imunisasi ini dilakukan serentak di sejumlah rumah sakit rujukan, termasuk RSUP H. Adam Malik di Medan, RSUP Dr. Mohamad Hoesin di Palembang, RS Pusat Otak Nasional dan RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso di Jakarta, RSUD Kota Bandung, serta RS Kemenkes Makassar CPI.

Program tersebut menasar 39.212 tenaga medis dan 223.150 tenaga kesehatan di 14 provinsi dengan tingkat kasus campak tertinggi. Selain itu, sebanyak 28.321 dokter umum dan dokter gigi internship di seluruh Indonesia turut menjadi sasaran vaksinasi.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penganggulangan Penyakit Kemenkes, dr. Andi Saguni, menegaskan pentingnya perlindungan bagi tenaga kesehatan sebagai garda terdepan layanan medis.

"Kementerian Kesehatan senantiasa berupaya melindungi tenaga medis dan tenaga kesehatan karena merupakan kelompok yang sangat berisiko terhadap penularan campak," ujar Andi dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (10/4).

Ia menambahkan bahwa imunisasi MR tidak hanya memberikan perlindungan individu, tetapi juga menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian wabah di lingkungan fasilitas kesehatan. "Imunisasi

ini diharapkan dapat membantu penanggulangan kasus campak di Indonesia," katanya.

Berdasarkan data surveilans, tren kasus campak nasional menunjukkan penurunan signifikan sepanjang awal 2026. Pada minggu pertama, jumlah kasus tercatat mencapai 2.220, kemudian menurun drastis menjadi 195 kasus pada minggu ke-13.

Meski demikian, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan, terutama di wilayah dengan beban kasus tinggi seperti Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Nusa Tenggara Barat.

Upaya lain yang terus dilakukan adalah percepatan Outbreak Response Immunization (ORI) di daerah terdampak. Hingga 9 April 2026, Kota Depok telah mencapai cakupan 100 persen, diikuti Kabupaten Bima sebesar 80,8 persen dan Kota Palembang sebesar 60,9 persen.

Direktur Utama RSUP H. Adam Malik, dr. Zainal Safri, menyatakan dukungannya terhadap program tersebut. "Kami menargetkan 160 tenaga kesehatan menerima vaksin pada hari pertama sebagai langkah awal perlindungan," ujarnya.

Sementara itu, RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang menyiapkan layanan imunisasi bagi sekitar 100 tenaga kesehatan guna memastikan pelayanan tetap berjalan optimal tanpa gangguan risiko penularan.

Di RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso, peningkatan kasus campak menjadi perhatian serius. Hingga April 2026, jumlah pasien yang ditangani mendekati 70 orang. "Tahun ini terjadi lonjakan dibandingkan tahun sebelumnya," kata dr. Nur Aliza.

Seorang dokter internship di RSUD

Kota Bandung, dr. Rizky, menilai program ini sangat penting bagi keselamatan tenaga kesehatan. "Vaksinasi ini memberikan perlindungan ganda, baik bagi tenaga medis, pasien, maupun lingkungan kerja," ujarnya.

Secara teknis, imunisasi MR diberikan dengan dosis 0,5 ml melalui suntikan subkutan. Pemberian vaksin disesuaikan dengan riwayat imunisasi sebelumnya, di mana tenaga kesehatan yang belum pernah divaksin diwajibkan menerima dua dosis dengan interval minimal 28 hari.

Secara historis, Indonesia telah melaksanakan kampanye imunisasi MR nasional pada 2017-2018 yang menargetkan lebih dari 67 juta anak. Program tersebut menjadi salah satu upaya terbesar dalam pengendalian campak dan rubella di kawasan Asia Tenggara.

Di tingkat global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa sebelum program vaksinasi masif diperkenalkan, campak menyebabkan lebih dari 2 juta kematian setiap tahun di seluruh dunia. Namun, melalui peningkatan cakupan imunisasi, angka kematian berhasil ditekan secara signifikan dalam dua dekade terakhir.

Meski demikian, dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah negara kembali mengalami lonjakan kasus campak akibat penurunan cakupan imunisasi dan mobilitas global yang tinggi, sehingga menempatkan tenaga kesehatan sebagai kelompok yang sangat rentan terpapar.

Dengan dimulainya imunisasi MR bagi tenaga kesehatan ini, pemerintah berharap perlindungan terhadap tenaga medis semakin kuat dan upaya pengendalian campak dapat berjalan lebih efektif secara berkelanjutan. (\*)

**PT FAREN GRAFIKA**

Harian Pagi  
**Baubau Post**

**KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN**

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik

Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi

Pemimpin Umum: Fauzan NWA  
Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi  
Redpel: Prasctio  
Korlip: Firman  
Redaktur: Kasrun, Rahim  
Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman

Layouter: Ririn  
Pracetak: Aditya  
Cetak: Jamaludin

Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01  
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara  
Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com

Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01  
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

Penerbit: PT FAREN GRAFIKA  
Komisaris: Erna Agule  
Direktur Utama: Andina Latief  
Manager Keuangan: Nabila DAA  
Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin  
Kepala Sirkulasi: Robi  
Administrasi: Salvana

Kepala Biro Wakatobi: Risman  
Kepala Biro Buton Utara: Kasrun  
Kepala Biro Buton: La Harman  
Kepala Biro Buton Selatan: Firman  
Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin  
Kepala Biro Sultra: Masuri

Agen Baubau: Jamaluddin  
Agen Buton Selatan: Firman  
Agen Buton: Samrihan  
Agen Buton Utara: Kasrun

Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan,  
Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks

## Kapolri Tindaklanjuti Arahan Presiden, Bentuk Satgas Penyelundupan



Kapolri Listyo Sigit Prabowo

### Laporan: Alwan

JAKARTA, BP-Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran aparat penegak hukum dan otoritas keuangan untuk memperkuat pemberantasan penyelundupan yang dinilai masih menjadi sumber kebocoran penerimaan negara. Instruksi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum Penyelundupan.

Langkah ini diumumkan melalui Surat Perintah Kapolri yang menandai dimulainya operasi terpadu untuk menindak berbagai praktik penyelundupan, baik dalam kegiatan ekspor maupun impor ilegal di seluruh wilayah Indonesia.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Ade Safri Simanjuntak, menjelaskan bahwa pembentukan satgas tersebut bertujuan menyelamatkan kekayaan negara sekaligus menutup celah kebocoran keuangan.

"Telah dibentuk

Satgas Penegakan Hukum terhadap tindak pidana penyelundupan yang merugikan kekayaan negara melalui Surat Perintah Kapolri," ujar Ade Safri dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4).

Satgas ini akan menyoroti berbagai bentuk kejahatan penyelundupan, termasuk perdagangan ilegal hasil sumber daya alam dan komoditas berbasis lingkungan hidup, baik yang terjadi di dalam maupun di luar kawasan pabean.

Dalam praktiknya, pelaku penyelundupan kerap menggunakan berbagai modus untuk menghindari pengawasan, seperti underinvoicing, under-accounting, hingga kesalahan deklarasi barang (missdeclare) dalam dokumen kepabeanan.

"Polri berkomitmen menindak tegas segala bentuk penyelundupan untuk menyelamatkan kekayaan negara," kata Ade Safri.

Ia menambahkan, penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu guna men-

dukung ketahanan ekonomi nasional yang menjadi fondasi kedaulatan negara.

"Penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu penting untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional," ujarnya menegaskan.

Presiden Prabowo sebelumnya juga menekankan bahwa praktik penyelundupan masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah.

"Gunakan segala wewenang yang ada pada anda untuk menghentikan penyelundupan," kata Prabowo dalam arahannya kepada Kapolri, Panglima TNI Agus Subianto, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Secara historis, upaya pemberantasan penyelundupan di Indonesia telah berlangsung sejak era Orde Baru, ketika pemerintah membentuk berbagai operasi terpadu untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor kepabeanan. Reformasi di bidang bea dan cukai juga diperkuat pasca krisis

ekonomi 1998 guna meningkatkan transparansi dan pengawasan perdagangan lintas batas.

Di tingkat global, praktik penyelundupan merupakan persoalan lintas negara yang juga menjadi perhatian organisasi seperti World Customs Organization. Lembaga ini secara rutin mendorong kerja sama antarnegara untuk menekan perdagangan ilegal yang merugikan ekonomi dan merusak ekosistem perdagangan yang adil.

Pembentukan satgas oleh Polri ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antarinstansi serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap arus barang, khususnya di titik-titik rawan penyelundupan.

Dengan pendekatan terpadu dan penegakan hukum yang konsisten, pemerintah optimis kebocoran penerimaan negara akibat praktik penyelundupan dapat ditekan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. (\*)

## Kejati Sita Rp2,3 M, Praktik Pungli ESDM Jatim Terungkap



Kejaksanaan Tinggi Jawa Timur menetapkan dan menahan tiga pejabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur

### Laporan: Hadi

SURABAYA, BP-Kejaksanaan Tinggi Jawa Timur menetapkan dan menahan tiga pejabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) perizinan. Dari hasil penyidikan, aparat mengamankan barang bukti berupa uang tunai dan saldo rekening dengan total mencapai Rp2,36 miliar.

Ketiga tersangka masing-masing adalah Kepala Dinas ESDM Jatim Aris Mukiyono, Kepala Bidang Pertambangan Ony Setiawan, serta Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah berinisial H. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup atas dugaan praktik korupsi dalam proses perizinan sektor energi dan sumber daya mineral.

Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim, Wagiyono, menjelaskan bahwa penyidikan dilakukan secara tertutup sejak 14 April 2026 berdasarkan laporan masyarakat, khususnya para pemohon izin yang merasa dipersulit dalam proses administrasi.

"Secara senyap kami melakukan penyelidikan sejak adanya pengaduan masyarakat. Dari situ kami menemukan adanya peristiwa pidana dan bukti awal yang cukup," ujar Wagiyono di Surabaya, Jumat (17/4).

Dalam praktiknya, para tersangka diduga menyalahgunakan sistem perizinan berbasis daring Online Single Submission (OSS). Proses yang semestinya transparan dan cepat justru diperlambat untuk mendorong pemohon memberikan sejumlah

uang.

"Modusnya memperlambat proses perizinan. Kalau tidak memberikan uang, izinnya tidak kunjung keluar meskipun syaratnya sudah lengkap," kata Wagiyono.

Tarif pungutan yang dipatok bervariasi. Untuk perpanjangan izin tambang, pemohon diminta menyediakan dana antara Rp50 juta hingga Rp100 juta. Sementara pengajuan izin baru dapat dikenai pungutan hingga Rp200 juta.

Adapun untuk Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPAT), pungutan berkisar Rp5 juta hingga Rp20 juta per dokumen, dengan total akumulasi dalam satu proses mencapai Rp50 juta hingga Rp80 juta.

"Hasil pungutan tersebut kemudian dibagi-bagikan di antara para pelaku, termasuk kepada pimpinan. Padahal layanan ini pada dasarnya gratis kecuali PNBPN," ujar Wagiyono.

Dari hasil penggeledahan di kantor maupun kediaman para tersangka, penyidik menyita uang tunai dan saldo rekening. Dari Aris Mukiyono disita sekitar Rp494,4 juta, dari Ony Setiawan Rp1,64 miliar, serta dari tersangka H sekitar Rp229,6 juta.

Kejati Jatim menjerat para tersangka dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk Pasal 12 huruf e dan huruf b, serta Pasal 606 KUHP terkait pemerasan dan gratifikasi.

Selain itu, penyidik juga membuka peluang pengembangan perkara, termasuk kemungkinan adanya tersangka baru dan dugaan tindak pidana pencu-

cian uang (TPPU). Untuk mendalami aliran dana, Kejati Jatim telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Kami tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Aliran dana masih kami telusuri bersama PPATK," ujar Wagiyono.

Secara historis, praktik pungli dalam sektor perizinan bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Sejak reformasi birokrasi digencarkan pada awal 2000-an, pemerintah berupaya memangkas praktik korupsi melalui digitalisasi layanan, termasuk peluncuran sistem OSS pada 2018 untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

Namun, sejumlah kasus menunjukkan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya menutup celah penyimpangan. Di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, praktik "cerent-seeking" dalam sektor perizinan masih menjadi tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan.

Secara global, Transparency International dalam laporan Indeks Persepsi Korupsi kerap menyoroti sektor perizinan sebagai area rawan korupsi, terutama di negara dengan sistem pengawasan yang belum optimal.

Kejati Jatim mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk melaporkan jika mengalami praktik serupa. Upaya partisipasi publik dinilai penting untuk memutus mata rantai korupsi dalam pelayanan publik. (\*)

## Pengurus PMI Baubau Resmi Dilantik, Fokus Ketersediaan Darah dan Relawan



Kebutuhan darah yang tinggi di Kota Baubau menjadi salah satu fokus utama Palang Merah Indonesia (PMI) setempat setelah pengurus struktural Markas PMI Kota Baubau masa bakti 2025-2030

### Laporan: Prasetio M

BAUBAU, BP-Kebutuhan darah yang tinggi di Kota Baubau menjadi salah satu fokus utama Palang Merah Indonesia (PMI) setempat setelah pengurus struktural Markas PMI Kota Baubau masa bakti 2025-2030 resmi dilantik di Aula Kantor Wali Kota Baubau, Palagimata, Selasa (14/04/2026).

Ketua PMI Kota Baubau, Yusman Fahim, menegaskan bahwa penguatan Unit Transfusi Darah (UTD) menjadi prioritas penting demi menjawab kebutuhan layanan kesehatan di daerah. Ia menyebutkan, saat ini proses administrasi dan perizinan UTD tengah dirampungkan.

"Proses administrasi UTD saat ini hampir selesai. Kami optimistis dalam waktu dekat izin resmi dapat terbit sehingga pelayanan bisa berjalan maksimal," ujar Yusman.

Menurutnya, kebutuhan darah di Baubau tidak hanya berasal dari rumah sakit pemerintah, tetapi juga dari fasilitas kesehatan swasta. Karena itu, keberadaan UTD yang dikelola secara profesional menjadi krusial untuk menjamin ketersediaan darah.

Ia menambahkan, PMI memiliki tang-

gung jawab besar tidak hanya dalam penanganan bencana, tetapi juga dalam pelayanan kesehatan dan pembinaan nilai kemanusiaan di tengah masyarakat.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Baubau, Wa Ode Hamsinah Bolu, yang turut hadir dalam acara tersebut, menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen kemanusiaan.

"Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi titik awal untuk memperkokoh dedikasi dalam melayani masyarakat," kata Hamsinah dalam sambutannya.

Ia menilai PMI sebagai organisasi kemanusiaan yang memiliki peran strategis dan tidak tergantikan, terutama dalam situasi darurat, bencana, maupun pelayanan sosial yang inklusif.

Lebih lanjut, Pemerintah Kota Baubau menyatakan komitmennya untuk mendukung penguatan kelembagaan PMI, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penyediaan sarana pendukung.

"PMI adalah mitra strategis pemerintah. Kami akan terus memperkuat sinergi, termasuk dalam pengelolaan Unit Donor Darah agar berjalan profes-

sional," ujarnya.

Salah satu langkah konkret yang didorong adalah optimalisasi pengelolaan Unit Donor Darah (UDD) di kawasan Lembah Hijau. Pemerintah daerah berkomitmen memfasilitasi koordinasi lintas sektor guna memastikan operasional UDD berjalan maksimal.

Menurut Hamsinah, pengelolaan UDD secara profesional tidak hanya meningkatkan kualitas layanan kesehatan, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pelantikan pengurus PMI Kota Baubau ini dipimpin langsung oleh Ketua PMI Kota Baubau, Yusman Fahim, dan berlangsung dalam suasana khidmat dengan dihadiri sejumlah pejabat daerah serta pemangku kepentingan.

Dalam konteks yang lebih luas, keberadaan PMI di Indonesia memiliki sejarah panjang sejak didirikan pada 17 September 1945, tidak lama setelah kemerdekaan Republik Indonesia. PMI menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan global yang bernaung di bawah International Federation of

Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC).

Secara internasional, gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah bermula dari inisiatif Henry Dunant pada 1863, yang kemudian melahirkan Komite Internasional Palang Merah (ICRC). Sejak saat itu, organisasi ini berkembang menjadi jaringan kemanusiaan terbesar di dunia.

Peran PMI di berbagai daerah, termasuk Baubau, merupakan bagian dari kontribusi Indonesia dalam jaringan kemanusiaan global tersebut, terutama dalam penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan, dan kegiatan sosial.

Dengan dilantikannya pengurus baru, PMI Kota Baubau diharapkan mampu meningkatkan kapasitas relawan, memperluas jangkauan layanan, serta menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Ke depan, sinergi antara PMI dan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci dalam memastikan pelayanan kemanusiaan berjalan efektif, responsif, dan berkelanjutan di tengah dinamika kebutuhan masyarakat. (\*)

## Wawali Baubau Wa Ode Hamsinah Resmikan KSB Lowu-Lowu, Dorong Mitigasi Bencana Berbasis Warga



Pemerintah Kota Baubau terus memperkuat kapasitas mitigasi bencana melalui penguatan Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kelurahan Lowu-Lowu, Senin (13/04/2026).

### Pewarta: Ardi

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau terus memperkuat kapasitas mitigasi bencana melalui penguatan Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kelurahan Lowu-Lowu, Senin (13/04/2026). Langkah ini menjadi bagian dari strategi membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana yang kerap mengintai wilayah kepulauan.

Penguatan yang dipimpin langsung Wakil Wali Kota Baubau, Wa Ode Hamsinah Bolu, tersebut dirangkaikan dengan apel serta simulasi uji Standard Operating Procedure (SOP) yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Dalam kegiatan yang dipusatkan di Lapangan Lowu-Lowu itu, pemerintah menekankan pentingnya kesiapsiagaan berbasis komunitas sebagai fondasi utama pengurangan risiko bencana.

"Kampung Siaga Bencana ini bukan sekadar program administratif, tetapi gerakan sosial untuk membangun kemandirian masyarakat," kata Wa Ode Hamsinah Bolu.

Ia menegaskan, keberadaan KSB diharapkan menjadi garda terdepan dalam merespons kondisi darurat secara cepat dan terorganisasi di tingkat lokal.

Menurutnya, posisi geografis Kota Baubau sebagai daerah kepulauan membuat wilayah ini rentan terhadap berbagai ancaman, seperti angin kencang dan banjir.

"Upaya mitigasi dan kesiapsiagaan ha-

rus dibangun bersama. Tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah," ujarnya.

Untuk memperkuat sistem respons darurat, Pemerintah Kota Baubau juga mendorong penguatan Lumbung Sosial sebagai cadangan logistik strategis yang dapat digunakan saat terjadi bencana.

Keberadaan fasilitas tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat melakukan penanganan awal secara mandiri tanpa harus menunggu bantuan dari luar daerah.

Selain itu, pemerintah turut mengoptimalkan peran Taruna Siaga Bencana (Tagana) dengan menyalurkan kalangan pelajar sebagai bagian dari edukasi kebencanaan sejak dini.

"Kita ingin generasi muda tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga tangguh menghadapi situasi darurat," kata Wa Ode Hamsinah.

Ia menambahkan, pendidikan kebencanaan di sekolah menjadi investasi jangka panjang untuk membentuk masyarakat yang sadar risiko dan mampu beradaptasi terhadap ancaman bencana.

Dalam konteks yang lebih luas, pembentukan KSB sejalan dengan kebijakan nasional yang digagas oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam memperkuat desa dan kelurahan tangguh bencana.

Program serupa telah dikembangkan sejak awal 2010-an, terutama pascabencana besar seperti tsunami Aceh 2004 yang menjadi titik balik penguatan sistem mitigasi di Indonesia.

Secara global, pendekatan berbasis komunitas juga menjadi bagian dari kerangka kerja internasional, seperti Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 yang menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengurangi risiko bencana.

Indonesia sendiri tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat risiko bencana tinggi di dunia karena berada di kawasan Cincin Api Pasifik (Ring of Fire), yang rawan gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api.

Oleh karena itu, langkah Pemerintah Kota Baubau dinilai sejalan dengan praktik terbaik internasional dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana.

Di akhir kegiatan, Wakil Wali Kota mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali menghidupkan budaya gotong royong sebagai kekuatan utama dalam menghadapi bencana.

"Jangan menunggu bencana datang untuk mulai bersiap. Kita harus membangun kesadaran sejak sekarang," tegasnya.

Ia berharap para peserta yang telah mengikuti simulasi dapat menjadi agen perubahan dengan menyebarkan pengetahuan mitigasi kepada masyarakat di lingkungannya masing-masing.

Dengan penguatan Kampung Siaga Bencana di Lowu-Lowu, Pemerintah Kota Baubau optimistis mampu menciptakan masyarakat yang lebih siap, tangguh, dan mandiri dalam menghadapi berbagai potensi bencana di masa mendatang. (\*)